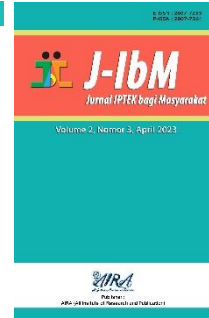


## Dissemination of the "SignalPolri" Application as Community Service of the GKPI Congregation Official Exemplary Congregation

Sosialisasi Aplikasi "SignalPolri" Sebagai Pengabdian Masyarakat Jemaat GKPI Resmi Jemaat Teladan



**Widalicin Januaryy\*, Desma Erica Maryati Manik, Petrus Loo**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya; Medan; Indonesia;*

\*Koresponden: [widalicin14@gmail.com](mailto:widalicin14@gmail.com)

<https://journal.aira.or.id/J-IbM> | <https://doi.org/10.55537/jibm.v3i1.670>

Naskah masuk: 24-07-2023; diterima untuk diterbitkan: 23-08-2023

**Abstract:** *This paper is the result of dedication to discuss the Socialization of the Police Signal Application. The purpose of this study was to find out the procedure for paying motorized vehicle tax online through the Medan City Police Signal application and to find out what obstacles occur when paying motor vehicle tax online through the Medan City Samsat Signal application and to find out what efforts have been made to overcome obstacles when paying motor vehicle tax online through the Medan City Police Signal application. The method used in this research is to use a qualitative descriptive method. From the writing that has been done, it can be concluded that motor vehicle tax payments do not need to go to the Samsat office but can be done through the online Signal application*

**Keywords:** *payment procedures; vehicle tax; signalpolri application;*

**Abstrak:** *Tulisan ini merupakan hasil pengabdian untuk membahas Sosialisasi Aplikasi SignalPolri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui aplikasi SignalPolri Kota Medan dan untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui aplikasi Signal Samsat Kota Medan dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan, telah dilakukan untuk mengatasi kendala saat membayar pajak kendaraan bermotor secara online melalui aplikasi Signal Polres Medan Kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari penulisan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak perlu ke kantor Samsat tetapi dapat dilakukan melalui aplikasi Signal online*

**Kata Kunci:** *prosedur pembayaran; pajak kendaraan; aplikasi signalpolri;*

### Pendahuluan

Di era digital, sejumlah fasilitas umum dituntut untuk dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Di antara kemudahan yang dibutuhkan masyarakat tersebut adalah dalam pembayaran pajak, terutama pajak kendaraan. Untuk itu, UPTD PPD SAMSAT sebagai fasilitas pelayanan untuk pembayaran pajak juga dituntut untuk berbenah. Salah satu upaya untuk mempermudah masyarakat membayar pajak adalah dengan adanya aplikasi Signal. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memerlukan banyak dana untuk memperlancar pembangunan-pembangunan di semua aspek dalam negaranya. Untuk memperoleh dana yang cukup untuk pembangunan



negaranya maka diperlukan pajak untuk menunjang pemasukan pada negara. Semakin tinggi pendapatan negara dalam bidang perpajakan maka semakin tinggi pula dana yang diperoleh negara untuk membantu melancarkan pembangunan untuk negara Indonesia, serta dapat membantu meringankan beban negara untuk kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Pajak menurut Erly Suandy (2008:9) menjelaskan bahwa “Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Sementara menurut Waluyo, (2007:2), “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat dari segala aspek. Maka dari itu pajak dapat juga diartikan sebagai salah satu alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan negara untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada wilayah Kota Medan Utara, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Kantor Bersama Samsat Medan Utara sebagai salah satu sumber penerimaan pajak yang potensial, yang mana Kantor Bersama Samsat Medan Utara memiliki keunggulan dalam jumlah wajib pajak kendaraan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wajib pajak tersebut dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah kepemilikan objek pajak kendaraan bermotor berplat nomor BK wilayah Medan dari jumlah balik nama kendaraan bermotor maupun dari jumlah pembelian kendaraan bermotor. Dari fenomena tersebut, seharusnya setiap terjadi peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor berplat nomor BK (objek pajak) wilayah Kota Medan akan berdampak positif pada setiap kenaikan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kantor Kantor Bersama Samsat Medan Utara. Namun pada kenyataannya, secara keseluruhan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Medan Utara belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan mudah, bahkan hingga menjadi piutang pajak satu tahun, piutang pajak limatahun, serta piutang pajak kadaluwarsa. Hal tersebut dilatarbelakangi perilaku kepatuhan wajib pajak yang tidak segera melunasi pajak terutangnya meskipun telah melewati masa pajak yang ditetapkan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut PP No. 65 Tahun 2001 adalah “Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat besar yang bergerak”.

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk golongan pajak langsung dan merupakan pajak lokal (daerah). Dipungut dari pemegang-pemegang kendaraan bermotor yang dihidupkan dengan generator gas arang atau memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin atau juga yang tidak semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan bakar. Sehingga Wajib Pajak menurut *Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009* adalah "Orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor". Jadi PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning.

Demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan adanya kerjasama dan kesadaran yang baik antara mereka yang memberikan pungutan pajak dengan mereka yang menjadi wajib pajak. Pajak sendiri merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proposional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Aplikasi SIGNAL merupakan pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Secara digital aplikasi ini memanfaatkan pangkalan data (database), kendaraan bermotor (ranmor) yang dimiliki Polri, pangkalan data induk kependudukan yang ada pada Dirjen Dukcapil Kemendagri dan sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh masing-masing Bapenda Provinsi Hal ini di integrasikan secara nasional sebagai sebuah sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) menggunakan aplikasi berjenis mobile platform untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara digital sekaligus mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terkait (Bapenda, Jasa Raharja dan Bank Pembangunan Daerah) tanpa mengabaikan fungsi pengawasan resident kepemilikan kendaraan yang menjadi salah tugas utama Polri. Sistem pada aplikasi Signal memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi identitas pemilik ranmor dengan melakukan pencocokan wajah (face matching) pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data KTP elektronik di Kemendagri. Kemudahan dengan adanya aplikasi Signal dapat membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di UPTD SAMSAT Kota Medan, pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan aplikasi Signal pun sudah bisa dilakukan.

## Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Selasa, 09 Mei 2023 berlokasi di Gereja GKPI Jemaat Khusus Teladan pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim dosen prodi Manajemen STIE Eka Prasetya beserta mahasiswa dan Jemaat GKPI Jemaat Khusus Teladan. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilihat berdasarkan tabel berikut

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Program PKM

<b>Tahap Persiapan</b>	
Pra – survei	Identifikasi permasalahan&kebutuhan mitra (permasalahan spesifik yang dialami mitra)
Pembentukan Tim PKM	Pembentukan Tim disesuaikan dengan jenis kepakaran untuk menyelesaikan permasalahan mitra
Pembuatan Proposal	Pembuatan proposal untuk menawarkan solusi permasalahan & penyediaan dana dalam pelaksanaan solusi bagi Mitra
Koordinasi Tim&Mitra	Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional dan <i>job description</i> dari Tim & Mitra
Persiapan Bahan Sosialisasi	Penyediaan alat presentasi serta pembuatan materi sosialisasi
<b>Tahap Pelaksanaan (Kegiatan Dilaksanakan di Lokasi Mitra tepatnya di kantor Kepala Desa Pematang Johar)</b>	
Sosialisasi pengenalan Aplikasi SignalPolri	Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi (30 menit)
Sosialisasi cara penggunaan Aplikasi SignalPolri	Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi (30 menit)
Sosialisasi cara kerja Aplikasi SignalPolri	Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi (30 menit)
<b>Pelaporan</b>	
Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program untuk kemudian dilakukan publikasi	

Program pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada mitra yang terdiri dari Jemaat GKPI Khusus Jemaat Teladan. Sosialisasi dilakukan dengan memaparkan materi sosialisasi aplikasi SignalPolri. Tujuan pengabdian ini adalah mensosialisasikan serta memberikan informasi sebagai sarana meningkatkan pengetahuan masyarakat dimana pengetahuan nantinya dapat digunakan sebagai solusi untuk menambahnya wawasan pengetahuan jemaat Gereja GKPI jemaat khusus teladan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Pengetahuan akan penggunaan aplikasi ini juga diharapkan sebagai dasar untuk menstabilkan pendapatan pemerintah dengan cara yang mudah dan lebih efisien. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Diskusi dilakukan berupa Tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan bertujuan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer ilmu saja melainkan dapat berbagi pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra.

## Hasil

Kegiatan sosialisasi aplikasi SignalPolri sebagai layanan masyarakat untuk jemaat GKPI jemaat khusus teladan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Pelaksanaan serta seluruh agenda kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Kegiatan pengabdian ini diharapkan menambahnya wawasan pengetahuan jemaat Gereja GKPI jemaat khusus teladan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Pengetahuan akan penggunaan aplikasi ini juga diharapkan sebagai dasar untuk menstabilkan pendapatan pemerintah dengan cara yang mudah dan lebih efisien. Adapun rincian kegiatan pengabdian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rundown Acara Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pukul	Materi
14.30 - 15.30	Persiapan
15.30 - 15.35	Kata sambutan pembukaan pelaksanaan kegiatan
15.35 - 15.45	Penandatanganan MOU
15.45 - 16.00	1. Foto bersama keseluruhan dengan perangkat desa dan masyarakat 2. Foto per tim kegiatan dengan masyarakat sasaran
16.00 - 16.05	Perkenalan STIE Eka Prasetya
16.05 - 17.05	Pelatihan oleh tim dosen
17.05 - 17.20	Coffee break
17.20 - 18.20	Pelatihan oleh tim dosen
18.20 - 19.00	Pembagian souvenir dan penutup

Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah kegiatan penandatanganan MOU antara Gereja GKPI sebagai gereja binaan dengan STIE Eka Prasetya. Pemateri menyampaikan materi memperkenalkan aplikasi mobile yang bernama SignalPolri, menampilkan video penggunaan aplikasi tersebut dan melakukan diskusi dengan peserta sosialisasi. Selama forum diskusi para jemaat banyak memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh tim dosen, sehingga suasana diskusi berlangsung dengan sangat menarik karena mendapat respon yang positif dari peserta sosialisasi.



Gambar 1. Sosialisasi Aplikasi SignalPolri



## Diskusi

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa Sosialisasi aplikasi penerintahan yang bernama SignalPolri kepada Jemaat GKPI khusus Jemaat teladan akan dimanfaatkan dengan memanfaatkan aplikasi yang telah dibuat pemerintah untuk mempermudah membayar pajak kendaraan. Berdasarkan diskusi dengan peserta saat sosialisasi dan data yang diperoleh dari website Pemerintahan masih banyak orang yang masih belum menggunakan aplikasi online tersebut sehingga dibuatlah sosialisasi tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan pemerintahan dan juga memudahkan untuk para jemaat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Salah satu pendapatan pajak yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor oleh karena itu pembayaran pajak kendaraan bermotor harus memiliki prosedur yang jelas agar masyarakat pun mudah memahaminya. Sehingga pelaksanaan pembayaran pajak bisa dilaksanakan dengan tertib sesuai yang diharapkan dan di pahami oleh wajib pajak. Oleh karena itu diadakannya kantor samsat (Sitem administrasi manunggal satu atap) yang gunanya untuk mempermudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran kendaraan bermotor. Mengikuti perkembangan zaman, UPTD PPD SAMSAT Kota Medan turut mempermudah masyarakat melalui aplikasi signal. Masyarakat yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat menyetorkan pajaknya dengan memanfaatkan kemudahan aplikasi tersebut.

## Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah para jemaat Gereja GKPI khusus Jemaat Teladan memiliki penambahan pengetahuan dalam penggunaan Aplikasi Pemerintahan yang bernama "SignalPolri" dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintahan serta kemudahan dan kepraktisan bagi para jemaat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

## Pengakuan/Acknowledgements

Terima Kasih kepada Bapak Ojak Lubis, S.Th selaku Pendeta serta Jemaat Gereja GKPI khusus Jemaat Teladan yang telah bersedia menjadi mitra dalam pengabdian.

## Daftar Referensi

- Mulyawan, A. and Novia, D. (2016) 'Aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor online berbasis web (studi kasus di samsat soreang kab. bandung)', *Jurnal Computech & Bisnis*, 10(1), pp. 30-39.
- Sagai, B. C. C., Rindengan, Y. D. Y. and Karouv, S. D. S. (2018) 'Analisa Kepuasan Masyarakat Pengguna Terhadap Layanan Aplikasi Pemerintah Kota Manado', *Jurnal Teknik Informatika*, 13(4), pp. 1-8.
- Indrajit, Richardus Eko. (2006). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tujni, Baibul., dan Hutrianto. (2018). Evaluasi Sistem e-SAMSAT Berbasis *Mobile* untuk Layanan Masyarakat Kota Palembang dengan Metode *Technologi Acceptance Model*. Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, 5 November 2018.
- Wardani, Dewi Kusuma., dan Juliansya, Fikri. (2018). Pengaruh Program e-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Akmenika*, 15 (2), 79-92.

- Erly Suandy. (2008). *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2007, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Pertama, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Ramadhan, Deni (2015). Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Medan Utara. (Skripsi Sarjana, Universitas Medan Area). <https://repositori.uma.ac.id/bidstream/123456789/9152/1/108330013.pdf>
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Pasal 5 Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Departemen Keuangan. Jakarta.